



Determinasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (studi kasus pada pemerintah kota palopo)

Amanda ^{1*}, Halim Usman ², dan Andika Rusli ³

¹ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo, Sulawesi Selatan;
email : amndsky0@gmail.com

² Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo, Sulawesi Selatan;
email : halim_accountinglecturer@umpalopo.ac.id

³ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo, Sulawesi Selatan;
email : andikarusli@umpalopo.ac.id

* Corresponding Author : Amanda

Abstract: Accountability in regional financial management is a crucial element in realizing transparent, effective, and responsible governance. This study aims to examine the extent to which public participation and internal supervision affect accountability in regional financial management. This study uses a quantitative method involving 80 respondents consisting of people who have been involved in development planning discussions and government officials within the Palopo City Government. Data were obtained through questionnaires and analyzed using a statistical approach. The results of the analysis show that both public participation and internal supervision have a positive and significant influence on accountability in regional financial management. This finding confirms that increasing public participation and strengthening internal supervision mechanisms play an important role in building more accountable regional financial management.

Keywords: Community Participation, Internal Supervision, Accountability, Regional Financial Management In Palopo City.

Abstrak: Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana partisipasi masyarakat dan pengawasan internal memengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan melibatkan 80 responden yang terdiri atas masyarakat yang pernah terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan dan aparatur pemerintah di lingkup Pemerintah Kota Palopo. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan pendekatan statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa baik partisipasi masyarakat maupun pengawasan internal memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan partisipasi publik serta penguatan mekanisme pengawasan internal berperan penting dalam membangun pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengawasan Internal, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo.

Received: May 8, 2025

Revised: May 16, 2025

Accepted: June 30, 2025

Published: July 7, 2025

Curr. Ver.: July 7, 2025



Copyright: © 2025 by the authors.

Submitted for possible open access publication under the terms

and conditions of the Creative

Commons Attribution (CC BY

SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu elemen krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Akuntabilitas sendiri sangat esensial karena dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya keuangan mereka secara bijaksana.

Pemerintah Kota Palopo telah mengeluarkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu aturan pentingnya adalah Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2021, yang mengatur akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2020. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga menekankan peranan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Meski telah menunjukkan komitmen terhadap peningkatan tata kelola, Pemerintah Kota Palopo sempat menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2014. Hal ini menjadi pemicu perbaikan internal, hingga akhirnya pemerintah daerah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten sejak 2015 hingga 2023.

Namun demikian, tantangan terhadap akuntabilitas masih tetap ada. Salah satu kasus terbaru adalah dugaan penyalahgunaan dana anggaran di RSUD Sawerigading, di mana Kejaksaan Negeri Palopo menemukan indikasi kejanggalan dalam laporan keuangan periode 2021–2023. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu aspek yang berperan penting dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya dapat meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas. Faktor ini memengaruhi keberhasilan program-program pembangunan dan pengembangan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam tiap tahap pengambilan keputusan, termasuk dalam mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada, kita dapat memastikan bahwa setiap inisiatif pembangunan berjalan dengan lebih efektif. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, setiap usaha pembangunan berpotensi tidak mencapai hasil yang diharapkan (Atiningsih & Ningtyas 2019). Studi oleh Rahim et al. (2021) dalam *Journal of Public Affairs* menegaskan bahwa keterlibatan publik dalam perencanaan anggaran berkontribusi signifikan terhadap transparansi dan penguatan sistem akuntabilitas keuangan pemerintah daerah di negara-negara berkembang.

Pentingnya partisipasi masyarakat terletak pada perlunya membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga. Keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang vital. Ketika masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan, mereka akan lebih memperhatikan penggunaan dana publik dan menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah. Khususnya dalam konteks pembangunan di desa, keterlibatan masyarakat memastikan bahwa proses pembangunan berjalan tepat sasaran, efisien, dan efektif (Wafirotn et al., 2019).

Sebaliknya, pengawasan internal sangat penting untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah. Pengawasan internal yang efektif memungkinkan pengelolaan anggaran yang tepat dan mengidentifikasi penyimpangan dengan cepat. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengawasan internal mencakup semua proses pemeriksaan, peninjauan, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan tanggung jawab dan fungsi organisasi.

Menurut (Rahman 2020), Pengawasan internal yang efektif berfungsi untuk meminimalkan risiko kecurangan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Penelitian (Syahril et al., 2023) menunjukkan bahwa audit internal yang efektif dapat meningkatkan keandalan sistem pengendalian internal dalam institusi pendidikan. Audit internal tidak hanya mencegah penyimpangan, tetapi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Selain itu, (Rusli 2024) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal berbasis risiko dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko yang memengaruhi kinerja. Hal ini mendukung pentingnya pengawasan internal yang tidak hanya

fokus pada kepatuhan, tetapi juga pada pencegahan risiko dan peningkatan kualitas informasi keuangan.

Selain itu, Mizrahi & Ness-Weisman (2020) dalam *International Journal of Public Sector Management* menyoroti bahwa pengawasan internal yang kuat memiliki korelasi positif dengan integritas pelaporan keuangan pemerintah dan persepsi publik terhadap kinerja birokrasi.

Penelitian sebelumnya oleh (Periansya & Sofyan 2020) berjudul "Dampak Kompetensi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rambutan Banyuasin" menjadi dasar dari penelitian ini. Terdapat beberapa perbedaan antara studi ini dan studi sebelumnya. Pertama, penelitian ini dilakukan di Kota Palopo, sementara penelitian sebelumnya dilakukan di Kecamatan Rambutan Banyuasin. Kedua, dalam penelitian sebelumnya, peneliti menggunakan dua variabel independen, yaitu kompetensi dan partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat dan pengawasan internal akan menjadi lebih penting.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dan pengawasan internal mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Judul penelitian adalah "Determinasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi kasus pada pemerintah Kota Palopo)", menurut penjelasan tersebut.

2. Kajian Pustaka atau Penelitian Terkait

2.1 Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* menekankan bahwa individu yang diberi tanggung jawab (steward) berkewajiban menjalankan tugasnya demi mencapai tujuan organisasi yang selaras dengan kepentingan publik (Donaldson & Davis, 1991). Dalam konteks sektor publik, pemerintah dianggap sebagai entitas yang mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Asumsi dasar teori ini berpijak pada pandangan bahwa manusia secara alami bersifat dapat dipercaya, bertanggung jawab, serta memiliki integritas moral yang tinggi (Kaihatu, 2006).

Dalam pelaksanaannya, teori ini diyakini mampu memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas layanan publik, terutama ketika pemerintah menjalankan amanah berdasarkan kepercayaan masyarakat. Namun demikian, Torfing & Bentzen (2020) mengemukakan bahwa penerapan prinsip *stewardship* dalam sektor publik masih menghadapi hambatan, seperti budaya birokrasi yang kaku serta rendahnya tingkat partisipasi warga.

Studi sebelumnya cenderung berfokus pada aspek struktural dan regulatif dalam mempengaruhi akuntabilitas, dan belum secara komprehensif menelaah kontribusi partisipasi masyarakat maupun pengawasan internal. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji pengaruh kedua faktor tersebut terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada Pemerintah Kota Palopo.

2.2 Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan merupakan unsur penting dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan anggaran dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif (Aprilya, 2020).

Demikian penelitian ini dilakukan dalam konteks perkotaan, temuan dari studi-studi sebelumnya di wilayah perdesaan tetap relevan. Misalnya, penelitian oleh Periansya & Sofyan (2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil serupa juga ditemukan oleh Watu et al. (2023), Jannah et al. (2018), dan Jaya (2019), yang menyimpulkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat berbanding lurus dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Namun, sebagian besar studi tersebut terbatas pada wilayah desa, yang tentu memiliki dinamika berbeda dibandingkan wilayah perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi *gap* tersebut dengan melihat sejauh mana partisipasi masyarakat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkup perkotaan, khususnya di Kota Palopo.

H1 : Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

2.3 Pengawasan Internal

Pengawasan internal merupakan proses pengendalian yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi pemerintahan itu sendiri guna memastikan bahwa aktivitas yang dijalankan telah sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Fungsi pengawasan ini penting untuk menjaga efisiensi serta efektivitas pelaksanaan program pemerintah (Sari, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2024) dalam konteks pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa pengawasan internal yang dilakukan aparat desa berdampak signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas. Demikian pula, studi dari Asmawanti et al. (2022) menegaskan bahwa pengawasan internal memiliki kontribusi penting dalam menjaga akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

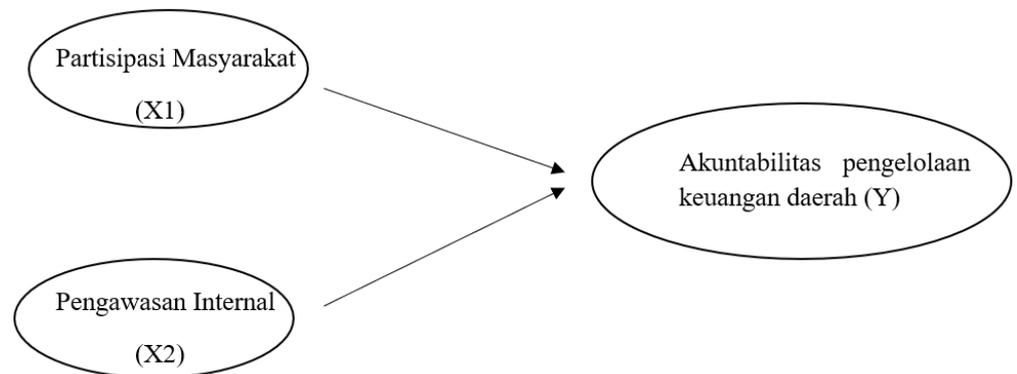
Demikian sebagian besar penelitian tersebut masih terfokus pada wilayah desa. Padahal, struktur pemerintahan di kota cenderung lebih kompleks, sehingga tantangan dalam pengawasan internal pun lebih besar. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk meninjau kembali peran pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Palopo.

H2 :Pengawasan Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

2.4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini merujuk pada kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik. Aspek ini mencakup transparansi dalam pelaporan keuangan dan efektivitas dalam mencapai tujuan pembangunan (Rosidah, 2023). Akuntabilitas tidak hanya sekadar kewajiban, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan serta tindakan yang diambil. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas melibatkan berbagai aspek seperti penyusunan laporan keuangan yang akurat, pengendalian internal yang efisien, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Viyurintina, 2024).

2.5 Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka berfikir

3. Metode yang Diusulkan

3.1 Jenis penelitian

Penelitian kuantitatif berbasis pada positivisme dan bertujuan untuk menganalisis populasi atau sampel tertentu. Metode pengambilan sampel acak umumnya digunakan dalam jenis penelitian ini, dan analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif atau statistik. Hipotesis yang telah dibuat sebelumnya diuji sebagai tujuan utama dari penelitian ini (Sugiyono, 2019:16). Menurut filsafat positivisme, realitas, gejala, atau fenomena dapat dikategorikan secara tetap, spesifik, terukur, dan berdasarkan hubungan sebab-akibat.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok responden. Pertama, masyarakat yang mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat RT/RW. Namun, jumlah pasti masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang di tingkat RT/RW tidak dapat ditentukan karena tidak adanya data resmi yang mencatat keterlibatan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam pemilihan responden, yaitu dengan memilih individu yang memenuhi kriteria pernah terlibat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat RT/RW. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan jumlah sampel masyarakat sebanyak 50 orang. Pemilihan jumlah tersebut didasarkan pada efektivitas dalam memperoleh informasi yang representatif dari berbagai tingkatan Musrenbang, serta mempertimbangkan keterbatasan waktu dan sumber daya penelitian. Menurut (Ghozali, 2008) dalam (Kusnadi, 2020) besaran sampel yang direkomendasikan berkisar dari 30 sampai 100 kasus, dengan asumsi bahwa semakin besar sampel, maka akan lebih tinggi akurasi data hasil penelitiannya. Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan sumber daya penelitian, jumlah 50 responden masyarakat dinilai cukup untuk mewakili populasi yang diteliti.

Kelompok kedua dalam populasi penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Total pegawai di BPKAD berjumlah 106 orang, yang terdiri dari 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 64 pegawai Non PNS. Namun, karena adanya keterbatasan dalam distribusi kuesioner, pihak BPKAD hanya memberikan izin kepada 30 pegawai PNS untuk menjadi responden dalam penelitian ini.

Dengan demikian, total sampel dalam penelitian ini berjumlah 80 responden, yang terdiri dari 50 masyarakat yang pernah mengikuti Musrenbang dan 30 pegawai PNS di BPKAD. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling, khususnya purposive sampling, karena sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

3.3 Sumber dan metode pengumpulan data

Untuk penelitian ini, kuesioner dibagikan kepada masyarakat umum dan staf BPKAD Palopo. Metode purposive sampling, yang merupakan pendekatan non-probabilitas, memungkinkan peneliti untuk memilih sampel berdasarkan standar yang relevan dengan tujuan penelitian. Data dikumpulkan menggunakan skala Likert lima poin, dengan nilai berikut: sangat setuju (SS=5), setuju (S=4), netral (N=3), tidak setuju (TS=2), dan sangat tidak setuju (STS=1).

3.4 Definisi Operasional

Penelitian ini melibatkan dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen berfungsi sebagai pengaruh terhadap variabel dependen. Dalam hal ini, variabel dependen yang diteliti adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y). Sementara itu, variabel independen yang berperan dalam penelitian ini terdiri dari partisipasi masyarakat (X1) dan pengawasan internal (X2). Dengan demikian, variabel dependen merupakan hasil atau konsekuensi dari adanya variabel independen tersebut.

Tabel 1. Operasional variable

No	Variabel	Definisi	Indikator	Referensi
----	----------	----------	-----------	-----------

1	Partisipasi Masyarakat (X1)	Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai tahap proses pembangunan. Mereka menekankan bahwa partisipasi bukan hanya sekadar keikutsertaan dalam pelaksanaan program, tetapi juga mencakup pengidentifikasian masalah, pengambilan keputusan, pelaksanaan solusi, dan evaluasi hasil dari kegiatan pembangunan tersebut.	-Keterlibatan dalam pengambilan keputusan: -Keterlibatan dalam pelaksanaan program:	Periansya & Sopiyan AR (2020)
2	Pengawasan Internal	Pengawasan internal merupakan bagian penting dari manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi, serta mendukung pencapaian tujuan secara keseluruhan.	-Evaluasi dan audit pengelolaan keuangan -Sistem pengendalian internal	Amalia et al (2024)
3	Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah	Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan, kinerja, dan hasil yang dicapai oleh individu, kelompok, atau institusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.	-Transparansi pengelolaan keuangan -pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	Periansya & Sopiyan AR (2020)

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda yang dijalankan melalui program SPSS. Sebelum melakukan analisis regresi, validitas konstruk instrumen diuji terlebih dahulu untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan memang mengukur variabel sesuai dengan konsepnya. Selanjutnya, dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas untuk memastikan residual terdistribusi normal, uji multikolinearitas dengan syarat nilai toleransi lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10 agar tidak terjadi korelasi tinggi antar variabel independen, serta uji heteroskedastisitas dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 guna menjamin varians residual bersifat konstan. Pengujian ini sangat penting untuk memastikan keandalan dan validitas hasil regresi. Regresi linier berganda dipilih karena metode ini sesuai untuk menguji pengaruh simultan dan parsial dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen, serta memungkinkan analisis hubungan sebab-akibat secara komprehensif. Dengan demikian, metode ini sangat tepat digunakan untuk melihat pengaruh partisipasi masyarakat dan pengawasan internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2$ = koefisien Regresi

X1 = partisipasi masyarakat

X2 = pengawasan internal

e = Error

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

4.1.1 Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2 menyajikan hasil analisis statistik deskriptif yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai data penelitian. Analisis ini mencakup informasi mengenai nilai rata-rata (mean), nilai maksimum (max), nilai minimum (min), serta standar deviasi untuk setiap variabel yang diteliti, yaitu Partisipasi Masyarakat (X1), Pengawasan Internal (X2), dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Partisipasi masyarakat (X1)	80	10.00	34.00	25.85	4.05063
Pengawasan internal (X2)	80	7.00	35.00	26.97	4.57283
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y)	80	7.00	35.00	26.71	4.50371
Valid N (Listwise)	80				

Sumber Data Primer diolah dengan SPSS, 2025

Analisis deskriptif menggambarkan distribusi data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana terlihat pada tabel sebelumnya. Nilai rata-rata partisipasi masyarakat sebesar 25,85 menunjukkan tingkat keterlibatan yang relatif tinggi, sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas (Aprilya, 2020). Rata-rata skor pengawasan internal sebesar 26,98 mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal di lembaga terkait sudah berjalan cukup baik, meskipun standar deviasi tertinggi pada variabel ini (4,57) menunjukkan adanya variasi yang cukup besar antar responden, yang sejalan dengan temuan Amalia (2024) mengenai perbedaan efektivitas pengawasan tergantung pada kapasitas dan disiplin aparat pengawas. Sedangkan skor rata-rata akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 26,71 menunjukkan tingkat akuntabilitas yang cukup baik, mendukung hasil penelitian Asmawanti et al. (2022) yang menegaskan hubungan positif antara akuntabilitas dengan partisipasi masyarakat dan pengawasan internal yang efektif. Oleh karena itu, hasil analisis deskriptif ini menjadi dasar yang kuat untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat dan pengawasan internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.1.2 Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item pernyataan	R hitung	R Tabel	Status
Partisipasi Masyarakat (X1)	X1	0.628	0.220	Valid
	X2	0.535	0.220	Valid
	X3	0.639	0.220	Valid
	X4	0.721	0.220	Valid
	X5	0.746	0.220	Valid
	X6	0.683	0.220	Valid
	X7	0.609	0.220	Valid

Pengawasan Internal (X2)	X1	0.611	0.220	Valid
	X2	0.690	0.220	Valid
	X3	0.706	0.220	Valid
	X4	0.695	0.220	Valid
	X5	0.665	0.220	Valid
	X6	0.644	0.220	Valid
	X7	0.732	0.220	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Y1	0.684	0.220	Valid
	Y2	0.613	0.220	Valid
	Y3	0.797	0.220	Valid
	Y4	0.655	0.220	Valid
	Y5	0.604	0.220	Valid
	Y6	0.636	0.220	Valid
	Y7	0.592	0.220	Valid

Sumber Data Primer diolah dengan SPSS, 2025

Semua item di atas valid, seperti yang ditunjukkan oleh tabel di atas, karena nilai Rhitung lebih besar dari Rtabel berdasarkan uji signifikan 0.05.

4.1.3 Uji Realibilitas

Tabel 4. Realibilitas Variabel penelitian

Variabel	Cronbach 's Alpha	Keterangan	N of Items
Partisipasi Masyarakat (X1)	0.768	0,60 (Reliabel)	7
Pengawasan Internal (X2)	0.803	0,60 (Reliabel)	7
Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah (Y)	0.773	0,60 (Reliabel)	7

Sumber Data Primer diolah dengan SPSS, 2025

Tabel 4 menunjukkan bahwa semua item pernyataan kuesioner dari setiap variabel memiliki nilai Cronbach 's Alpha lebih dari 0.60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item variabel kuesioner dinyatakan reliabel.

4.2 Uji asumsi klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Tabel 5. Normalitas

Kolmogorov-Smirnov	Unstandardized Residual
N	80

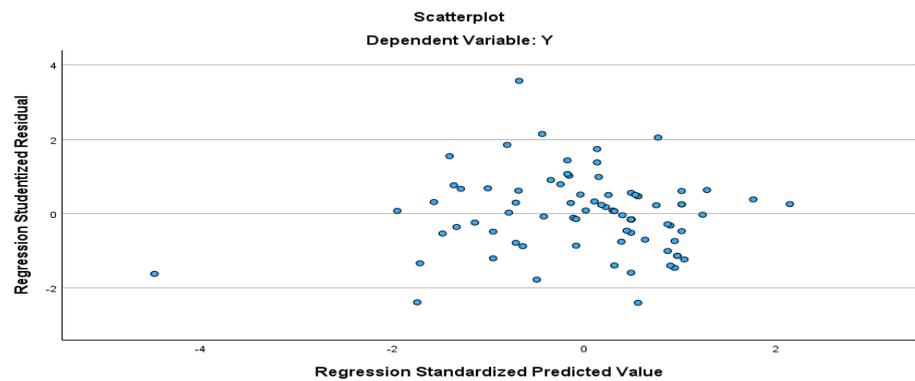
Asymp.Sig.(2-tailed)

0.200

Sumber Data Primer diolah dengan SPSS, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0.200 melebihi tingkat signifikansi 0,05, yang menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti distribusi normal.

4.2.2 Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pada tabel diatas bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model regresi, seperti yang ditunjukkan oleh hasil uji Glejser dan pemeriksaan scatterplot. Variasi residual, yang tampaknya konstan atau homoskedastis, mendukung validitas analisis regresi yang dilakukan.

4.2.3 Uji Multikolinearitas

Tabel.6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF(Variance Inflation Factor)
Partisipasi masyarakat (X1)	0.998	1.002
Pengawasan internal (X2)	0.998	1.002

Sumber Data Primer diolah dengan SPSS, 2025

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen; nilai Tolance untuk kedua variabel (X1 dan X2) adalah 0.998, dan nilai VIF adalah 1.002. Dengan demikian, model regresi dapat digunakan tanpa masalah multikolinearitas.

4.3 Uji Hipotesis

4.3.1 Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

	Y = 2.253 + 0.677X1 + 0.258X2 + e		
	Coefficient	t-statistic	sig
Konstanta	2.253	1.010	0.316
X1	0.677	7.151	<0.001
X2	0.258	3.082	0.003
N = 80			

$R^2 = 0.619$

Adj. $R^2 = 0,609$

F-Statistic = 62.44 Sig. = < 0.001^b

Variabel Dependen Adalah Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan variabel independen adalah Partisipasi masyarakat dan pengawasan internal.

* signifikansi pada $\alpha = 0.05$

X1 adalah Partisipasi masyarakat, X2 adalah Pengawasan internal dan Y adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat (X1) memiliki pengaruh paling signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan koefisien sebesar 0,677. Selain itu, pengawasan internal (X2) juga memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas, meskipun kontribusinya lebih kecil dengan koefisien 0.258.

Kedua variabel tersebut signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 99% (nilai Sig < 0,05), dengan nilai Sig untuk partisipasi masyarakat < 0,001 dan untuk pengawasan internal sebesar 0,003. Namun, konstanta sebesar 2,253 tidak signifikan (Sig = 0,316), yang menunjukkan bahwa tanpa kontribusi partisipasi masyarakat dan pengawasan internal, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dijelaskan secara memadai.

4.3.2 Hasil Uji t

Dari hasil uji T, variabel partisipasi masyarakat (X1) memiliki nilai t sebesar 7,151 dengan tingkat signifikansi < 0,001, yang berada di bawah ambang batas signifikansi 0,05 (5%). Dengan nilai t hitung yang lebih besar dari nilai t tabel (7,151 > 1,991), hipotesis H1 diterima: Ini mengonfirmasi bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, variabel pengawasan internal (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 3,082 dengan tingkat signifikansi 0.003. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel (3,082 > 1,991), hipotesis H2 juga diterima : yang berarti pengawasan internal memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas.

4.3.3 Hasil Uji F

Hasil uji F menunjukkan nilai sebesar 62,44 dengan tingkat signifikansi <0,001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan pengawasan internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.3.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Nilai R^2 sebesar 0,619 menunjukkan bahwa 61,9% variasi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh partisipasi masyarakat dan pengawasan internal. Sisanya, yaitu 38,1%, dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Adjusted R^2 yang bernilai 0,609 memberikan estimasi yang lebih akurat karena mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam model. Ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup baik untuk menjelaskan variasi dalam data.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, variabel partisipasi masyarakat (X1) menunjukkan nilai sebesar 7,151 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,001. Nilai ini jauh di bawah ambang batas signifikansi 0,05 dan melebihi nilai kritis 1,991. Temuan ini menguatkan penerimaan hipotesis pertama, yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif

yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah. Keterlibatan aktif mencerminkan transparansi anggaran dan sejalan dengan teori *stewardship*, di mana pengelola bertanggung jawab mengelola sumber daya untuk kepentingan publik. Partisipasi ini memperkuat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, masyarakat menentukan prioritas kebutuhan melalui musyawarah dan survei. Dalam pelaksanaan, mereka mengawasi jalannya program agar sesuai dengan anggaran serta berkontribusi dalam kegiatan pembangunan. Sementara itu, tahap evaluasi melibatkan masyarakat dalam memberi umpan balik melalui forum transparansi dan audit sosial. Keterlibatan aktif ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian terdahulu oleh (Periansya & Sofyan 2020) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, semakin besar pula partisipasi masyarakat yang dilibatkan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat tidak hanya memperkuat transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menjadikan pengelolaan keuangan daerah lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4.4.2 Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan tingkat signifikansi 0.003, variabel pengawasan internal (X2) menunjukkan nilai sebesar 3,082, yang lebih besar dari nilai *t* tabel dan di bawah batas signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05. Oleh karena itu, hipotesis kedua diterima, yang menyatakan bahwa pengawasan internal memiliki efek yang baik dan besar terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengawasan internal yang efektif berperan penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengendalian internal yang baik memungkinkan deteksi dini terhadap kesalahan atau penyimpangan, sehingga dapat segera diperbaiki. Selain itu, pengawasan ini memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip tata kelola yang baik. Sejalan dengan teori *stewardship*, pengelola keuangan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanah dengan profesionalisme dan integritas. Pengawasan internal yang independen dan profesional menjadi bentuk komitmen manajemen dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran sesuai regulasi yang berlaku.

Penelitian ini juga mendukung temuan sebelumnya oleh Amaliah (2024), yang menunjukkan bahwa pengawasan internal memiliki dampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, semakin besar pula pengaruh dari pemantauan internal yang diterapkan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

Hipotesis pertama diterima, yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin besar keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas yang dapat dicapai. Partisipasi aktif ini menjadi salah satu bentuk transparansi publik yang mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hipotesis kedua juga diterima, di mana pengawasan internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan yang efektif dan menyeluruh membantu memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meminimalkan risiko penyimpangan, serta memperkuat

sistem pengendalian internal yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah di Kota Palopo memerlukan partisipasi masyarakat yang lebih aktif melalui Musrenbang, diskusi publik, dan transparansi informasi. Edukasi publik dan pemanfaatan teknologi digital juga penting untuk memperkuat keterlibatan masyarakat. Di sisi lain, pengawasan internal perlu diperkuat melalui pelatihan auditor, penerapan e-audit, dan sistem pelaporan yang transparan.

Secara praktis, pemerintah daerah perlu memperluas ruang partisipasi yang inklusif dan meningkatkan kapasitas APIP dengan dukungan SDM dan teknologi. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi variabel tambahan seperti budaya organisasi, SDM, dan teknologi informasi dengan pendekatan kualitatif atau campuran. Penelitian ini turut memperkaya literatur keuangan daerah dan menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan akuntabel berbasis partisipatif.

Daftar Pustaka

- [1] Ahmad, H. F. (2022). *Pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap kinerja karyawan dalam perspektif ekonomi Islam (Studi pada PT BPRS Bandar Lampung)* (Tesis, UIN Raden Intan Lampung).
- [2] Amalia, L., Hendarmin, R. R., & Nurkholis, K. (2024). Pengaruh sistem informasi akuntansi, peran perangkat desa, dan aparatur pengawasan internal pemerintahan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 5564–5573.
- [3] Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh kompetensi, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(3).
- [4] Asmawanti-S, D., Hermadisya, G., Sari, N., & Fitranita, V. (2022, April). Persepsi penyajian laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, dan pengawasan internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)* (hlm. 1658–1675).
- [5] Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Influence of competence of village fund management apparatus, community participation, and internal control system on village fund management accountability. *Journal of Applied Management and Accounting Sciences*, 10(1), 14–25.
- [6] Budiana, I. M. (2019). *Employee engagement: Implikasi praktik manajemen sumber daya manusia (Studi kasus pada PT ACI)* (Disertasi, Universitas Negeri Jakarta).
- [7] Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- [8] Erikha Viyurintina, E. S. (2024). Good governance dan kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal Media Akademik*, 2(4), 3031–5220.
- [9] Ghozali, I. (2008). *Structural equation modeling metode alternatif dengan partial least square*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- [10] Jannah, R., Handajani, L., & Firmansyah, M. (2018). The influence of human resources, use of information technology and public participation to the transparency and accountability of village financial management. *International Journal of Scientific Research and Management*, 6(5), 373–385.
- [11] Jaya, I. M. L. M. (2019). Determinan akuntabilitas keuangan dana desa pasca penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Akuntansi*, 9(3), 201–218.
- [12] Kaihatu, T. S. (2006). Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(1), 1–9.
- [13] Kusnadi, I. H. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten Subang. *Savala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(1), 30–57.
- [14] Mizrahi, S., & Ness-Weisman, I. (2020). Evaluating the effectiveness of internal audits in local authorities: The role of organizational culture and internal audit independence. *International Journal of Public Sector Management*, 33(1), 23–38. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2019-0173>
- [15] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [16] Periansya, P., & Sofyan, A. R. (2020). Dampak kompetensi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Kecamatan Rambutan Banyuwangi. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(1), 12–19.
- [17] Rahim, F. A., Aziz, M. A. A., & Salleh, N. M. (2021). Public participation and financial accountability in local government budgeting: Evidence from developing countries. *Journal of Public Affairs*, 21(3), e2649. <https://doi.org/10.1002/pa.2649>
- [18] Rahman, R. F. (2020). *Evaluasi atas implementasi audit internal, pengendalian internal, dan pencegahan kecurangan (fraud)* (Skripsi, Universitas Komputer Indonesia).
- [19] Rosidah, I., Kesumah, P., & Rizka, R. B. (2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam pencegahan fraud di instansi pemerintah (Studi kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi: EMBA*, 2(1), 137–156.
- [20] Rusli, A. (2024). *Sistem pengendalian internal berbasis risiko*. Minhaj Pustaka.

-
- [21] Sari, E. W., Azlina, N., & Julita, J. (2017). Pengaruh sistem pengendalian intern, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan gaya kepemimpinan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hulu (Tesis, Universitas Riau).
- [22] Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [23] Syahril, S., Sudirman, R., & Rusli, A. (2023). Menelusuri fungsi internal audit dan sistem pengendalian internal Universitas Muhammadiyah Palopo. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 7(1), 1–12.
- [24] Wafirotin, K. Z., & Septivastuti, U. (2019). The effect of transparency, community participation, and accountability on management of village funds in Ponorogo Regency. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 14(1), 31–43.
- [25] Watu, D., Londa, Y., & Sayang, S. (2023). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 4(2), 107–118.